
POTRET STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI MASALAH PENGANGGURAN DI INDONESIA: TINJAUAN STUDI LITERATUR

Dewi Lusiana¹, Moh Badrul Qomar², Aldi Setiadi³

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

³Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

e-mail: ¹dewilusiana.dl17@gmail.com, ²qmogbadrul@gmail.com, ³aldi74708@gmail.com

Diterima	Direvisi	Disetujui
29-07-2024	31-07-2024	08-08-2024

Abstrak - Pengangguran masih menjadi masalah utama di Indonesia. Meskipun pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah pengangguran, faktanya persoalan ini masih belum selesai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kembali bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran di Indonesia berdasarkan pada strategi dan kebijakannya. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi literatur. Hasil penelitian menjelaskan bahwa ada beberapa upaya sebagai strategi dan kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menyempurnakan sistem pendidikan, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan informasi lapangan pekerjaan yang akurat dan transparan, menyelenggarakan program pelatihan kerja, mengembangkan potensi kelautan dan menyederhanakan perizinan investasi. Mengingat jika masalah pengangguran tidak hanya disebabkan dari satu dimensi saja sehingga pemerintah juga perlu menyelesaikan masalah ini melalui berbagai dimensi.

Kata Kunci: Masalah Pengangguran, Strategi dan Kebijakan Pemerintah.

Abstract - Unemployment is still a major problem in Indonesia. Although the government has made several efforts to address the unemployment problem, the fact is that this problem is still not resolved. This study aims to reanalyze how the government's efforts in overcoming unemployment in Indonesia are based on its strategies and policies. The method used in research is the study of literature. The results of the study explain that there are several efforts as strategies and policies that can be carried out by the government in overcoming the unemployment problem, namely improving the education system, creating jobs, providing accurate and transparent job information, organizing job training programs, developing marine potential and simplifying investment licensing. Given that the problem of unemployment is not only caused from one dimension, the government needs to solve the problem of unemployment from various dimensions.

Keyword: Problem Unemployment, Government Strategy and Policy

PENDAHULUAN

Sejak dulu hingga saat ini masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah pengangguran. Pengangguran dengan jumlah besar berpengaruh pada tingkat kemiskinan, tindak kejahatan yang merajalela dan masalah sosial lainnya. Meningkatnya jumlah tenaga kerja dan krisis ekonomi dalam waktu panjang mengakibatkan timbulnya masalah ketenagakerjaan yang cukup rumit. Pada dasarnya, masalah pengangguran memang menjadi persoalan yang berdampak pada negara maju dan berkembang (Agunowei & Blanchard, 2022). Sebagai negara berkembang, Indonesia disoroti dari tingginya tingkat pengangguran yang disebabkan oleh terbatasnya lapangan kerja dan padatnya jumlah penduduk (Humaira et al., 2022).

Terbatasnya lapangan kerja akibat dari lemahnya modal yang tersedia untuk dijadikan sumber investasi. Hal ini terjadi disebabkan oleh krisis ekonomi yang melesukan ekonomi global, di mana hampir seluruh pelaku usaha mengalami kerugian. Kerugian timbul karena pelaku usaha tidak mampu memenuhi kewajiban dari modal yang dipinjam, kemudian mengakibatkan banyak tenaga kerja atau buruh di pecat dari perusahaan tempatnya bekerja. Alasannya sangat memprihatinkan yaitu perusahaan tidak sanggup membayar seluruh tenaga kerja. Untuk bertahan didalam ketidakpastian kemudian perusahaan menentukan kebijakan yaitu memberhentikan para buruh dan pekerja. Sehingga hal demikian lah yang memicu terjadinya lonjakan pengangguran dengan begitu dahsyat (Oktaviana & Rahmawati, 2020).

Apabila kita menengok pada beberapa dekade, asal muasal terjadinya ledakan pengangguran dimulai dari tahun 1998 di mana saat itu dikenal dengan istilah krisis moneter. Krisis moneter adalah suatu kondisi di mana melemahnya perekonomian negara yang kemudian berdampak pada berbagai sektor. Saat terjadi krisis moneter di negara-negara Asia menciptakan likuiditas di seluruh bidang usaha termasuk Indonesia. Likuiditas ini sebagai respon dari guncangan krisis ekonomi moneter. Terjadinya likuiditas pada saat itu menyebabkan hampir dari 8000 pekerja dan buruh diberhentikan dari perusahaan dalam waktu yang cukup panjang (Dewita Hia, 2013).

Belum lama di Indonesia kembali terjadi ledakan pengangguran, ledakan ini tidak hanya berlangsung di negara kita, tetapi di seluruh dunia. Memasuki tahun 2020 Indonesia digegerkan dengan adanya wabah pandemi. Pandemi covid-19 adalah salah satu penyakit yang mematikan. Sampai-sampai untuk menghindari penularan dari covid-19, pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Lockdown dan sebagainya. Tidak sedikit masyarakat berdiam diri di rumah, segala aktivitas vakum, sekolah-sekolah diliburkan sementara waktu. Lebih mirisnya akibat dari pandemi banyak pekerja dan buruh di berhentikan dari perusahaan tempatnya mencari penghidupan. Alasannya sama di saat terjadi krisis moneter yakni para pengusaha tidak sanggup membayar buruh dan tenaga kerja. Mengingat tidak kondusifnya aktivitas perusahaan yang kemudian berakibat fatal pada likuiditas perusahaan. Hal ini membuat pengusaha harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada buruh dan karyawan walaupun dengan berat hati mereka mengambil keputusan (Oktaviana & Rahmawati, 2020).

Jika masalah pengangguran didiamkan begitu saja, sangat memungkinkan kedepan terjadi berbagai permasalahan lain di Indonesia. Masalah ini tidak hanya menimpa pencari kerja yang baru saja menuntaskan pendidikan, namun tenaga kerja dan buruh bisa terkena dampaknya. Masalah pengangguran bisa menjadi persoalan kompleks karena bisa mengarah pada masalah sosial, psikologis dan lainnya. Masalah sosial bisa dipetakan dari banyaknya orang tua, remaja, dan anak kecil yang turun di jalanan untuk memenuhi kehidupan dengan cara mengamen, menjual koran, menjual jajanan bahkan menjadi pelaku tindak kejahatan. Sementara untuk masalah psikologi bisa dipetakan dari banyaknya usia tenaga kerja yang mengonsumsi obat-obatan terlarang, depresi hingga berujung mengakhiri diri (Singh et al., 2020).

Sebenarnya ada banyak hal yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di Indonesia, salah satunya adalah ketenagakerjaan (Rahayu & Avista, 2018). Apabila kita memperhatikan sekeliling, sedikit sekali tenaga kerja yang bekerja secara mandiri, lebih-lebih menciptakan lapangan usaha dan kemudian merekrut masyarakat setempat. Saat ini, hampir seluruh dari tenaga kerja diarahkan di sektor formal. Sangat jarang tenaga kerja yang diarahkan di sektor informal. Jadi disaat mereka kehilangan pekerjaan di sektor formal mereka kebingungan karena tidak terbiasa bekerja secara mandiri di sektor informal, kemudian banyak dari mereka menjadi pengangguran (Krisnandika et al., 2021).

Pengangguran terdidik muncul dari persoalan dunia pendidikan yang tidak mampu menghasilkan tenaga kerja berkualitas seperti tuntutan zaman. Kemudian menghasilkan tenaga

kerja yang lemah bila dibandingkan dengan tenaga kerja asing yang berasal dari luar negeri. Hal semacam ini menjadi permasalahan yang tengah dihadapi negara Indonesia. Sehingga banyak ditemui tenaga kerja dengan pendidikan tinggi yang tidak bekerja meskipun mereka memiliki titel sarjana. Fakta ini menyoroti bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih cukup lemah. Hal ini bisa dibuktikan dari lembaga pendidikan yang kurang mengutamakan tingkat profesional seorang siswa untuk berkarir setelah menempuh studi (Dewita Hia, 2013).

Saat ini pendidikan di Indonesia lebih mengutamakan pemahaman teori tanpa diimbangi dengan bagaimana menerapkan ilmu dalam dunia kerja. Sangat disayangkan bukan, pembelajaran yang dilakukan di sekolah hanya disampaikan biasa-biasa saja hingga murid menjadi jenuh. Apabila kita mengikuti arus pendidikan seperti saat ini, seseorang bisa saja mempuni dalam hal teori namun lemah perihal praktik di dunia industri. Kualitas tenaga kerja yang masih rendah menjadi penyumbang terbesar dalam meningkatkan jumlah pengangguran (Taufiqurokhman, 2014:90). Mengetahui hal ini penting dilakukan pengkajian untuk mengetahui bagaimana strategi dan kebijakan yang nantinya diambil pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran.

Menurut Fikri & Gopar (2021) masalah pengangguran bisa diselesaikan dengan menciptakan program kartu prakerja bagi masyarakat. Adanya program kartu prakerja dapat menambah keterampilan tenaga kerja selain itu program ini memberikan dukungan finansial bagi penggunanya. Sementara Krisnandika et al. (2021), menyatakan bahwa masalah pengangguran bisa diselesaikan selain memberikan pelatihan kerja melalui program kartu prakerja, negara harus menentukan kebijakan fiskal dan moneter serta memberikan subsidi keringanan biaya pajak kepada masyarakat. Kebijakan fiskal dan moneter ini dapat berpengaruh pada kestabilan ekonomi yang nanti bisa mengurangi jumlah pengangguran, begitu pula adanya subsidi pajak bagi masyarakat.

Dalam penelitian Humaira et al., (2022) dijelaskan jika masalah pengangguran bisa dituntaskan dengan menciptakan tenaga kerja yang cekatan sesuai dengan kebutuhan dunia industri, menyiapkan lapangan pekerjaan seluas mungkin dan memberikan informasi seputar pekerjaan dan tenaga kerja. Menurutnya, beberapa cara di tersebut sangat membantu dalam menanggulangi masalah pengangguran. Disisi lain hasil temuan Firnawati et al. (2016) menjelaskan bahwa masalah pengangguran bisa di atasi dengan menempuh beberapa cara diantaranya: Pemerintah harus menambah modal kerja kepada masyarakat, memberikan pelatihan tenaga kerja, melibatkan masyarakat pada industri padat karya, membangun proyek umum dan menciptakan gairah masyarakat untuk berbelanja.

Masalah pengangguran merupakan masalah lama yang tidak ada hentinya. Pengangguran menjadi masalah yang sulit diselesaikan baik dari ilmu ekonomi maupun pemerintahan. Meskipun demikian, pemerintah masih terus berupaya dalam menanggulangi masalah ini. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran salah satunya dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat agar dapat bersaing dalam dunia kerja. Masalah pengangguran bisa diatasi dengan meningkatkan modal tenaga kerja, melakukan pelatihan tenaga kerja dengan menyesuaikan formasi kerja, mendirikan industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja, melancarkan pembangunan proyek yang ada di Indonesia dan meningkatkan daya beli masyarakat dengan menambah besaran jumlah uang beredar. Lebih jauh dijelaskan beberapa upaya ini sebagai langkah tepat bagi pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia (Mentari & Qarni, 2023).

Tren masalah ketenagakerjaan di Indonesia tidak lepas dari terbatasnya daya serap perekonomian terhadap angkatan kerja yang terus meningkat (Rahayu & Avista, 2018). Kurangnya pengalaman dan keterampilan kerja menjadi salah satu alasan mengapa seseorang berstatus pengangguran. Pengangguran merupakan permasalahan yang sudah berlangsung lama, namun hingga kini belum teratasi secara optimal di wilayah Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa upaya, salah satunya dengan

menyelenggarakan kursus pelatihan ketenagakerjaan. Ikhtiar dari pelatihan ini sebagai bentuk harapan guna mengurangi jumlah pengangguran yang ada (Nurhidayati et al., 2021).

Lebih jauh, pengangguran mampu melemahkan perekonomian suatu negara. Karena mengurangi penghasilan masyarakat, hilangnya minat berinvestasi dan menghadirkan berbagai persoalan sosial ekonomi. Beberapa upaya yang sesuai untuk mengurangi tingkat pengangguran menurut Nurrahman (2020) dengan memberikan informasi lapangan pekerjaan kepada masyarakat, mengadakan pelatihan kerja secara gratis dan mengawasi lembaga pendidikan supaya meningkatkan kualitasnya. Sementara Siregar et al., (2022) menjelaskan masalah pengangguran bisa diatasi dengan menerapkan program pelatihan job fair. Job fair adalah badan pelatihan yang disiapkan pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memperoleh pekerjaan. Pelatihan yang diberikan seperti menjahit, tata boga, dan tata rias. Tujuan dari adanya program pelatihan adalah untuk memberi keterampilan kepada masyarakat agar dapat menciptakan usaha, terlebih lapangan pekerjaan.

Pada beberapa penelitian di atas menunjukkan upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran sangat beragam. Masih terdapat ketidakkonsistenan antara hasil penelitian yang satu dengan lainnya. Selain itu, jika dilihat dari jumlah pengangguran yang ada, pengangguran masih dikatakan relatif tinggi. Artinya, pemerintah belum sepenuhnya berhasil mengentaskan masalah pengangguran di Indonesia dan masalah pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Maka penting untuk melakukan studi lebih lanjut mengenai pengangguran dan peran pemerintah dalam mengatasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau kembali bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran di Indonesia berdasarkan pada strategi dan kebijakan yang dilakukan.

Strategi adalah rencana jangka panjang yang dilakukan individu maupun kelompok untuk menghantarkannya pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan di masa yang akan datang. Lebih lanjut, strategi adalah rencana tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapai keadaan yang diinginkan (Nazarudin, 2020:2). Sementara Carl J. Federick dalam Taufiqurokhman (2014:2) menjelaskan kebijakan merupakan suatu perbuatan yang diusulkan individu, kelompok bahkan pemerintah pada suatu keadaan di mana adanya permasalahan dan kesempatan dalam melaksanakan usulan kebijaksanaan untuk meraih tujuan yang telah ditentukan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga menjelaskan kebijakan adalah serangkaian konsep yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan rencana kerja, kepemimpinan, dan menentukan tindakan. Sehingga disimpulkan, kebijakan pemerintah adalah suatu kebijakan yang ditujukan kepada masyarakat dalam arti seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai kedudukan dan untuk kepentingan umum), baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak, yang tercermin dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat.

Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang tengah mencari kerja namun belum kunjung mendapatkannya. Pengangguran di sini tidak termasuk ibu rumah tangga yang tidak bekerja karena mengurus rumah atau keluarga, para pelajar dan mahasiswa yang masih bersekolah. Namun, pengangguran yang dimaksudkan adalah orang yang sungguh-sungguh mencari kerja tetapi belum memperolehnya. Lebih lanjut, pengangguran didefinisikan dengan orang yang tidak bekerja tetapi giat mencari kerja, atau seseorang yang masih menunggu panggilan perusahaan untuk bekerja. Pengangguran juga dimaknai dengan orang yang tidak bekerja, berusaha untuk mencari pekerjaan selama satu bulan terakhir, baru saja diberhentikan dari perusahaan tempatnya bekerja, seseorang yang sedang mempersiapkan lamaran pekerjaan dan menunggu panggilan kerja dari tempatnya melamar (Ridwan & Nawir, 2021:50).

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa pengangguran adalah orang yang tidak sedang bekerja tetapi masih mencari pekerjaan atau orang yang sudah diterima bekerja namun masih menunggu waktu bekerja di tempat yang baru. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Sementara seseorang yang tidak sedang bekerja dan tidak melakukan tindakan untuk memperoleh

pekerjaan tidak disebut sebagai pengangguran (Nurrahman, 2020). Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengangguran adalah seseorang yang sudah berupaya mencari pekerjaan namun belum memperolehnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran pada Februari 2023 mencapai 7,99 juta. Sebelumnya November 2022 mencapai 8,94 juta. Meskipun jumlah pengangguran mengalami tren penurunan, tetapi angka tersebut dinilai masih relatif besar. Apabila kita meninjau lebih jauh mengenai pengangguran, jumlah yang terbilang memiliki potensi buruk terhadap keberlangsungan bangsa. Tidak hanya sebatas menimbulkan tindak kejahatan. Lebih dari itu, masalah pengangguran dapat menimbulkan banyak persoalan sosial, tingginya angka kemiskinan dan menghambat pertumbuhan suatu negara. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang tidak bekerja atau menganggur mengakibatkan pemborosan (Ridwan & Nawir, 2021:50).

Bisa dibayangkan betapa pilunya seseorang yang tidak bekerja dan hanya berdiam diri tanpa memperoleh penghasilan. Sementara kebutuhan konsumsi untuk bertahan hidup seperti beras, daging, sayuran, gula, pakaian, air, listrik dan sebagainya tidak ada habisnya. Belum lagi bila yang menduduki posisi pengangguran adalah orang tua yang harus membayar biaya pendidikan anaknya, menyiapkan dana darurat ketika keluarga sakit dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin kebutuhan ini bisa terpenuhi meskipun mereka menduduki posisi pengangguran ringan misalnya pengangguran musiman (Dewita Hia, 2013).

Pengangguran musiman adalah jenis pengangguran yang bertumpu dengan cuaca alam. Pengangguran ini biasanya diduduki oleh para petani dan nelayan (Nurrahman, 2020). Sederhananya dapat dicontohkan ketika tiba musim hujan seorang petani karet tidak bisa menyadap karet sehingga libur sementara waktu. Selain itu bisa dicontohkan dari sektor nelayan, di mana saat kondisi laut sedang pasang mereka tidak berani untuk berlayar mencari ikan. Sehingga untuk sementara waktu mereka tidak bekerja dan berdiam diri di rumah, menunggu hingga cuaca alam mendukung mereka untuk bekerja dan memperoleh penghasilan (Ridwan & Nawir, 2021:52).

Pengangguran musiman sebenarnya bukan satu-satunya jenis pengangguran yang ada. Namun masih banyak jenis pengangguran lain. Jika ditinjau dari tipenya pengangguran terdiri dari empat jenis, diantaranya pengangguran terbuka, setengah menganggur, terselubung dan musiman (seperti yang telah diuraikan di atas). Lebih jauh dijelaskan bahwa pengangguran terbuka adalah jenis pengangguran yang terjadi akibat dari tingginya jumlah tenaga kerja dan rendahnya lapangan pekerjaan. Dalam artian, tenaga kerja tidak terserap oleh dunia industri sehingga mereka menganggur dalam jangka waktu yang lama (Silalahi & Walsh, 2023).

Selanjutnya, pengangguran dengan tipe setengah menganggur adalah pengangguran yang terjadi akibat seseorang bekerja dibawah jam operasional dari yang seharusnya, misalnya tidak lebih dari 35 jam dalam satu pekan. Contoh dari pengangguran dengan tipe setengah menganggur adalah seorang guru honorer. Kemudian pengangguran terselubung adalah pengangguran yang terjadi akibat dari lebihnya jumlah tenaga kerja di suatu perusahaan (tempat bekerja). Sehingga tenaga kerja yang tidak sepenuhnya berkontribusi diperusahaan itu disebut pengangguran terselubung. Contoh dari pengangguran terselubung adalah para waiters di suatu rumah makan dengan jumlah yang banyak dari yang seharusnya dibutuhkan (Nurrahman, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menganalisis berbagai penelitian terdahulu baik itu buku, jurnal maupun artikel terkait dengan penelitian. Tujuan dari metode ini untuk mengungkapkan teori yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi penulis kemudian menjadikan penelitian tersebut sebagai rujukan dalam hasil dan pembahasan penelitian.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, penulis menentukan tema yang akan dibangun dalam penelitian. Mencari permasalahan dan menentukan tujuan penelitian. Kemudian mencari referensi yang sesuai dengan penelitian melalui google scholar dan publish or perish menggunakan kata kunci pengangguran dan peran pemerintah dalam mengatasinya. Dari hasil pencarian ditemukan 50 artikel bertema pengangguran dan peran pemerintah kemudian artikel tersebut dianalisis untuk memperoleh tulisan yang sesuai dengan penelitian. Setelah dianalisis, ditemukan 17 artikel yang sesuai dengan penelitian. Dari 17 artikel tersebut kemudian dipahami dan dianalisis dan dijadikan rujukan penelitian. Setelah analisis selesai, proses selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari hasil analisis yang ditemukan. Hasil analisis yang ditemukan kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan yang sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengangguran adalah masalah yang sampai saat ini dihadapi berbagai negara, termasuk Indonesia. Ada banyak hal yang bisa terjadi jika masalah pengangguran terus dibiarkan. Rendahnya perekonomian suatu negara, munculnya masalah sosial ekonomi dan ketidakstabilan politik dapat mengakibatkan aksi demonstrasi dan maraknya tindak kejahatan, di mana semua hal ini merefleksikan tingginya jumlah pengangguran di Indonesia (Oktaviana & Rahmawati, 2020). Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah terus berupaya mengatasi masalah pengangguran karena pengangguran dinilai menjadi pekerjaan rumah yang wajib diselesaikan. Berdasarkan acuan pada penelitian terdahulu diantaranya (Dewita Hia, 2013; Nurrahman, 2020; Siregar et al., 2022; Humaira et al., 2022; Sanjaya & C, 2022). Ada beberapa upaya sebagai strategi dan kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu sebagai berikut.

1. Menyempurnakan sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang biasa-biasa saja akan menghasilkan lulusan yang lemah. Oleh karena itu pemerintah perlu membenahi sistem pendidikan dengan menekankan lembaga studi untuk tidak hanya sekedar memberi pengetahuan secara monoton dalam bentuk materi tetapi menyelengi pembelajaran dengan menerapkan ilmu pengetahuan dalam bentuk praktik sesuai bidang yang diminati. Upaya ini dilakukan supaya siswa terbiasa dengan dunia kerja, dari sini lembaga pendidikan dapat menciptakan pelajar unggul yang tidak sebatas paham teori, tetapi dapat bertindak secara profesional di lingkungan kerja. Haluannya dengan bermodal skill dan pengetahuan pelajar mampu bersaing di dunia kerja serta dapat memenuhi tuntutan zaman. Sehingga adanya kebijakan ini dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada.
2. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pemerintah bisa mengatasi masalah pengangguran dengan mengembangkan industri padat karya. Mengingat masyarakat Indonesia mempunyai taraf pendidikan yang rendah dan investasi menjadi sektor utama dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Maka pemerintah bisa mengembangkan dunia industri dari modal negara atau asing. Pemerintah bisa menggiring masyarakat yang putus sekolah untuk ikut bekerja dalam proyek-proyek umum yang telah disiapkan. Contoh dari proyek ini berupa pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jembatan dan lain-lain. Adanya strategi dan kebijakan ini dapat membantu masyarakat memperoleh pekerjaan. Khususnya bagi mereka yang berpendidikan rendah, di mana tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada.
3. Memberikan informasi lapangan pekerjaan secara akurat dan transparan. Selain meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah juga dapat memberikan berbagai informasi seputar lowongan pekerjaan di setiap media. Tujuannya adalah untuk memudahkan calon tenaga kerja khususnya lulusan perguruan tinggi untuk memperoleh pekerjaan. Pemerintah dapat menyediakan lapangan pekerjaan dengan cara bekerjasama antara instansi pendidikan yang menghasilkan

banyak lulusan perguruan tinggi dan bidang industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Adanya kebijakan ini harapannya calon tenaga kerja dapat terserap dalam lapangan pekerjaan yang disediakan perusahaan. Uraian di atas memberikan penjelasan bahwa pemerintah sebagai intermediasi antara lembaga pendidikan dan perusahaan yang membutuhkan banyak tenaga kerja.

4. Menyelenggarakan program pelatihan kerja kepada masyarakat. Program pelatihan yang dimaksudkan misalnya seperti Loka Pelatihan Kerja (LPP) yang dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia baik di pedesaan maupun perkotaan. Program ini berupa pelatihan otomotif, konveksi, tata boga, tata rias dan masih banyak lagi. Mengingat pelatihan kerja sangat dibutuhkan sebab membantu masyarakat memperoleh penghasilan. Adanya Program ini dapat menciptakan keterampilan, mengetahui minat, bakat dan kemampuan masyarakat. Tujuan program ini supaya masyarakat menciptakan usaha secara mandiri. Meskipun masyarakat tidak menciptakan usaha secara mandiri, setidaknya mereka bisa bekerja di suatu perusahaan dan menempati bidang tertentu seperti yang telah diajarkan dalam program pelatihan. Dengan begitu penerapan dari kebijakan ini membantu masyarakat memperoleh pekerjaan dan mengurangi jumlah pengangguran.
5. Mengembangkan potensi kelautan di setiap wilayah. Sebagai negara yang memiliki letak strategis Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya dari sektor maritim. Terlebih mengingat wilayah perairan Indonesia sangat luas, pemerintah dapat memaksimalkan sektor kelautan untuk menanggulangi masalah pengangguran. Mengoptimalkan potensi disektor kelautan, dapat dilakukan dengan mengembangkan industri pariwisata misalnya memanfaatkan keindahan pantai, menciptakan hotel, restoran, area bermain di sekitar pesisir. Meskipun kebijakan pengembangan potensi kelautan telah diterapkan di Indonesia namun penerapan ini belum optimal. Karena beberapa tahun terakhir dunia pariwisata sempat tersendat akibat munculnya wabah pandemi atau covid-19. Sehingga kebijakan ini bisa menjadi momentum untuk menghidupkan kembali dunia pariwisata sekaligus sebagai upaya mengurangi jumlah pengangguran yang ada, karena banyak sekali lapangan pekerjaan yang nanti tercipta dari potensi kelautan.
6. Menyederhanakan perizinan kegiatan investasi. Meskipun pemerintah telah melakukan reformasi untuk mempermudah kegiatan investasi, tetapi akses masuk para investor dinilai masih cukup rumit. Sehingga perlu ada penyederhanaan kembali dalam aktivitas investasi. Maka dengan pemerintah menyederhanakan perizinan kegiatan investasi, investor asing maupun domestik lebih bergairah memmanifestasikan dananya untuk mengembangkan industri. Industri yang berkembang akan memberikan banyak manfaat, salah satunya menghadirkan berbagai lapangan kerja. Adanya kebijakan ini, membantu masyarakat memperoleh pekerjaan kemudian mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Tidak hanya itu, pesatnya perkembangan investasi menambah pendapatan per kapita yang nanti bermuara pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara.

KESIMPULAN

Pengangguran adalah masalah lama yang terus berlanjut sampai saat ini. Semakin hari jumlah pengangguran terus meningkat, sehingga menjadi pekerjaan rumah yang wajib diselesaikan pemerintah. Persoalan pengangguran tidak hanya sebatas sempitnya lapangan pekerjaan, namun rendahnya kualitas tenaga kerja dari suatu negara dapat mempengaruhi tingginya pengangguran. Selain itu pengangguran muncul disebabkan oleh sedikitnya bantuan modal asing yang diterima suatu negara, sulitnya perizinan dalam mengembangkan usaha, dan tingginya ekspektasi para buruh dan tenaga kerja terhadap gaji yang diterima. Beberapa hal ini sangat berpengaruh dalam menghambat ketenagakerjaan di Indonesia. Semua masalah yang ada nampaknya telah dimengerti oleh pemerintah. Akan tetapi pemerintah belum sepenuhnya

memahami bahwa masalah ketenagakerjaan terjadi disebabkan oleh berbagai dimensi. Sehingga pemerintah perlu melakukan kebijakan dari berbagai dimensi pula untuk mengatasi permasalahan yang ada, mengurangi jumlah pengangguran dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Agunowei, D. I., & Blanchard, E. G. (2022). The Role of Politics, Policy, and Governance in Tackling Unemployment in Nigeria. *Journal of Lexicography and Terminology*, 6(1), 60–70. <https://journals.unza.zm/index.php/jlt>
- Dewita Hia, Y. (2013). Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Pengangguran. *ECONOMICA: Journal of Economic and Economic Education*, 1(2), 208–213. <https://doi.org/10.22202/economica.2013.v1.i2.121>
- Fikri, Y. T. A., & Gopar, I. A. (2021). Analisis Peningkatan Angka Pengangguran akibat Dampak Pandemi Covid 19 di Indonesia. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 107–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.56874/eksya.v3i1.737>
- Firawati, Muhammadiyah, & Ansyari, M. (2016). Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Pengangguran di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), 238–250.
- Humaira, M., Batubara, M., & Yusuf, M. (2022). Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Pengangguran di Kota Binjai Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 2312–2323. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4990>
- Krisnandika, V. R., Aulia, D., & Jannah, L. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(3), 720–729. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2227>
- Mentari, E. C., & Qarni, W. (2023). Peran Pemerintah Melalui Program Pelatihan dalam Mengurangi Jumlah Pengangguran Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan). *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 505–520. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i1.18134>
- Nazarudin. (2020). Manajemen Startegik. In NoerFikri Offset. [http://repository.radenfatah.ac.id/7078/1/Buku manajemen strategik-digabungkan.pdf](http://repository.radenfatah.ac.id/7078/1/Buku%20manajemen%20strategik-digabungkan.pdf)
- Nurhidayati, S., Kurniawansyah, H., & Hartini, S. (2021). Peran pemerintah Daerah dalam Mengatasi Pengangguran di Kabupaten Sumbawa. *JKSAP: Jurnal Kapita Selekt Administrasi Publik*, 1(2), 110–119. <http://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/ksap>
- Nurrahman, A. (2020). Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Permasalahan Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Registratie*, 2(1), 1–8. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/6283>
- Oktaviana, Y., & Rahmawati, A. (2020). Dampak Krisis Ekonomi Pandemi Terhadap Peningkatan Pengangguran Pada Tahun 2020 di Jakarta Barat. *Journal of Economic*, 13(2), 202–207. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Eko/article/download/5518/pdf>
- Rahayu, S. E., & Avista, B. (2018). Analisis Pengaruh Ekonomi Kreatif Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Medan. *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan 2018*, 174–184. [http://repository.una.ac.id/48/2/sri endang rahayu, Bella.pdf](http://repository.una.ac.id/48/2/sri%20endang%20rahayu,%20Bella.pdf)
- Ridwan, & Nawir, I. S. (2021). *Buku Ekonomi Publik (Pertama)*. Anggota Institut Keguruan dan Ilmu Pendiidikan.
- Sanjaya, P. N., & C. (2022). Analisis Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan, Ketimpangan Dan Pengangguran Di Indonesia. *C*, 3(I), 41–61. <https://doi.org/http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/salam/article/view/12257>
- Silalahi, M. S., & Walsh, S. (2023). Analyzing Government Policies in Addressing Unemployment and Empow-ering Workers: Implications for Economic Stability and Social Welfare. *Law and Economics*, 17(2), 92–110. <https://journals.ristek.or.id/index.php/LE/inde>
- Singh, A. K., Singh, P. K., & Misraa, A. K. (2020). Combating Unemployment Through Skill Development. *Nonlinear Analysis: Modelling and Control*, 25(6), 919–937. <https://doi.org/https://doi.org/10.15388/namc.2020.25.20598>
- Siregar, S. R., Nawawi, Z. M., & Irham, M. (2022). Peran Pemerintah Melalui Program Pelatihan dan Job Fair dalam Mengurangi Jumlah Pengangguran Menurut Perspektif

Ekonomi Islam (Studi pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 103–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.56874/eksya.v3i1.737>
Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik. In *Universitas Moestopo Beragama Pers* (Issue 1993).